

Agama dan Politik: Apa yang Tuhan Perbuat dengannya?

Syarifudin Syarifudin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
syarifudin66@gmail.com

Suggested Citation:

Syarifudin, Syarifudin. (2022). Agama dan Politik: Apa yang Tuhan Perbuat dengannya? *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 2, Nomor 2: pp 295-298. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v2i1.16877>

Article's History:

Received June 2022; Revised June 2022; Accepted June 2022.
2022. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

Abstrak:

Kajian ini merupakan analisis tekstual atas artikel yang ditulis oleh Jocelyn Cesari mengenai agama dan politik. Di dalamnya Cesari menantang apa yang disebut pengecualian dari kekerasan agama dengan mempertanyakan pemisahan yang rapi antara politik dan agama yang membuat segala bentuk interaksi antara keduanya tidak sah atau berbahaya. Cesari juga melihat secara spesifik tindakan negara vis-à-vis agama sejak lahirnya negara-bangsa dan menunjukkan bahwa kasus-kasus kekerasan paling ekstrem atas nama agama sebenarnya terkait erat dengan bentuk-bentuk politisasi agama tertentu yang diprakarsai oleh para pelaku "sekuler" seperti lembaga negara. Ia berpendapat bahwa status "hegemonik" yang diberikan kepada agama oleh negara sering dikaitkan dengan kekerasan politik yang lebih besar, yang dibangun berdasarkan penelitian yang dilakukan di Mesir, Turki, Irak, dan Pakistan.

Kata Kunci: sekularisasi; negara-negara Muslim; kekerasan agama; nasionalisme; hegemoni negara

Abstract:

This study is a textual analysis of articles written by Jocelyn Cesari on religion and politics. Cesari challenges the so-called exclusion of religious violence by questioning the neat separation between politics and religion that makes any interaction between the two illegal or dangerous. Cesari also looks specifically at the actions of the state vis-à-vis religion since the birth of the nation-state. She shows that the most extreme cases of violence in the name of religion are closely related to certain forms of politicization of religion initiated by "secular" actors such as state institutions. He argues that the "hegemonic" status bestowed on religion by the state is often associated with greater political violence, building on research conducted in Egypt, Turkey, Iraq, and Pakistan.

Keywords: secularization; Muslim countries; religious violence; nationalism; state hegemony

PENDAHULUAN

Tulisan ini adalah *review* atas karya Cesari, J. (2015). Religion and politics: what does God have to do with it?. *Religions*, 6(4), 1330-1344.

GARIS BESAR ISI ARTIKEL

Cesari memulai diskusi tentang agama dan politik dari siapa yang memulai pertanyaan tentang hubungan antara keduanya. Menurut Cesari, tanpa keraguan, karya Talal Asad (Asad, 1993) atau Connolly (Connolly, 1999) telah dengan kuat mempertanyakan definisi agama sebagai seperangkat kepercayaan dan menunjukkan bahwa pemahaman ini, jauh dari universal, adalah hasil langsung dari evolusi historis agama Kristen di Barat.

Faktanya, serangan pihak Barat di wilayah Muslim menunjukkan bahwa kepemilikan dan perilaku sama pentingnya dalam politisasi agama. Perbedaan antara percaya, memiliki, dan berperilaku telah dibuat oleh para sosiolog untuk memahami bentuk-bentuk religiusitas modern. Ketiga dimensi ini secara historis telah dikaitkan secara sistematis atau dikaitkan dengan definisi religiusitas seseorang. Mereka masing-masing merujuk pada kepercayaan, praktik keagamaan, dan identitas kolektif dan telah lama ditetapkan sebagai bagian tak terpisahkan dari religiusitas seseorang. Namun, analisis sosiologis baru-baru ini menjelaskan peningkatan disjungsi tiga dimensi ini dan memahami disjungsi ini sebagai bentuk religiusitas modern (Davie, 1996; Hervieu-Léger, 2003). Dengan demikian, seseorang dapat percaya tanpa secara otomatis berperilaku dan memiliki; bisa milik tanpa percaya atau berperilaku; atau bisa berperilaku tanpa percaya atau memiliki.

Di negara-negara Muslim, transformasi yang dibawa oleh negara-bangsa terutama telah mengubah kepemilikan warga negara terhadap Islam melalui perpaduan identifikasi keagamaan dan nasional. Kami telah menyebutkan bagaimana dari historiografi nasional ke hukum perdata, sosialisasi politik telah memperkenalkan kepemilikan pada bentuk hegemonik Islam sebagai identik dengan milik bangsa. Karena alasan ini, apa yang secara tradisional dianggap religius, seperti kepercayaan pada Tuhan sekarang secara politis dibahas dalam kasus-kasus publik yang membahas kemurtadan atau penistaan. Penting untuk ditekankan bahwa politisasi kepemilikan agama ini membentuk ruang publik modern. Orang dapat berargumen bahwa kepemilikan Islam juga merupakan kunci dalam mendefinisikan ruang publik pra modern: setelah semua, pelanggaran terhadap keyakinan Islam di ruang publik disetujui oleh kematian. Tetapi hukuman ini pada akhirnya berada di tangan para Ulama, bukan dari otoritas politik. Sebaliknya, negara modern, bukan Ulama, telah mengambil hukuman atas kemurtadan atau penistaan, bahkan di negara-negara sekuler seperti Mesir atau Pakistan atau Tunisia. Campur tangan negara ini tidak unik: beberapa negara Eropa telah mempertahankan hingga sekarang hukum penistaan agama (baru-baru ini, Inggris menghapuskan undang-undang penistaan agama setelah 9/11). Namun demikian, sekularisasi sosial dan budaya sebenarnya telah membuat undang-undang ini menjadi usang di zaman modern. Sementara di negara-negara Muslim, politisasi agama dalam negara-bangsa telah membuat mereka lebih digunakan dan menjadi pusat ruang publik daripada di periode Islam pra-modern (Lapidus, 1975).

Penegasan Islam secara publik dan kolektif ini berbeda dari praktik atau kepercayaan keagamaan pribadi. Sebenarnya, analisis pemisahan antara memiliki dan berperilaku dapat menjelaskan perubahan politik yang menarik dan tampaknya kontradiktif di Turki, Tunisia, Pakistan, dan bahkan Irak. Semua dimulai sebagai proyek nasional sekuler didasarkan pada beberapa referensi Islam. Ini berarti bahwa Islam dan bangsa menjadi satu dalam satu kelompok yang sama dalam upaya untuk melawan proyek transnasional Islam (Pan-Islamisme/Sufisme). Pada saat yang sama, di semua negara ini, fase nasional pertama menghasilkan sekularisasi praktik keagamaan warga negara dalam hal kode pakaian, hubungan gender, dan gaya hidup. Namun dalam tiga dekade terakhir, masyarakat ini telah mengalami Islamisasi yang lebih besar tercermin dalam peningkatan jilbab, serta perilaku dan ucapan yang benar secara Islam. Konsekuensinya, ketegangan politik tidak lagi menjadi milik, dalam arti bahwa kaum Islamis mulai berdamai dengan kerangka kerja nasional. Lagi pula, klaim negara Islam di masa lalu dan sekarang adalah bukti penerimaan terhadap apa yang awalnya dianggap sebagai asing. Meskipun iterasi Islamisme terbaru seperti al Qaida dan sekarang ISIS sedang dalam upaya masing-masing untuk menghancurkan negara-bangsa. Apa yang sekarang dipertanyakan adalah perilaku warga beriman-warga negara dan konsekuensinya terhadap hak-hak perempuan, kebebasan berbicara dan berekspresi.

Selain itu, penelitian penulis memvalidasi apa yang telah diisyaratkan oleh para sarjana lain, yaitu, tradisi keagamaan bukanlah prediktor yang baik untuk menjelaskan kekerasan politik. Temuan ini berbicara kepada beberapa perdebatan penting tentang masalah agama dan politik. Misalnya, benturan peradaban Huntington yang disebutkan di atas, telah banyak dikritik. Faktanya, sebagaimana telah dibahas di atas, banyak survei menunjukkan bahwa hegemoni agama, bukan perbedaan agama, meningkatkan konflik dan kemungkinan politisasi agama. Dalam nada yang sama, menurut data Pew, 33 persen negara yang didominasi oleh satu agama memiliki tingkat kekerasan berbasis agama yang tinggi, dibandingkan dengan 20 persen negara di mana tidak ada agama yang mendominasi (Grim & Finke, 2010).

Akhirnya, tidak seperti apa yang masih ditegaskan oleh kebanyakan teori perkembangan politik, keterlibatan negara dalam agama tidak selalu menjadi hambatan bagi demokrasi tetapi status hegemonik agama mungkin. Penyelidikan yang bermanfaat, di luar ruang lingkup artikel ini, akan melihat bentuk-bentuk alternatif sekularisme di luar perbedaan negara dan agama, dan kecocokan masing-masing dengan demokrasi.

KAJIAN KRITIS ATAS ARTIKEL

Berbicara antara agama dan politik merupakan sebuah perbincangan yang sangat kompleks. Di era post modern ini keduanya menjadi sebuah kesatuan yang sulit untuk dipisahkan, seolah-olah keduanya adalah satu term yang menyatu antara satu sama lainnya. Dominasi antara agama dan politik menjadi sebuah tarikan yang aktif. Dan keduanya saling tarik menarik membawakan sebuah kepentingannya masing-masing.

Dalam artikel jurnal di atas setidaknya membahas bagaimana persinggungan antara keduanya. Selain itu, dapat dilihat pula bahwa agama dijadikan alat dan dipolitisasi dan masuk ke ranah negara. seperti yang terjadi di Irak, Mesir, Turki, Pakistan, Tunisia dan lain-lain. Di negara-negara tersebut merupakan sebuah contoh bagaimana Agama dijadikan alat untuk melegitimasi kekuasaan negara sehingga menimbulkan sebuah klaim bahwa Islam merupakan sebuah agama hegemonik.

Politik sejatinya hanyalah seni untuk mengatur ranah kekuasaan. Walaupun pada praktiknya, politik bisa melebar kemana-mana. Pada tingkat tekstual politik maknanya baik-baik saja. Pada tingkat konteks atau pelaksanaannya, politik bisa berubah menjadi menakutkan. Politik sebenarnya tidak menakutkan, tetapi hari-hari ini menjadi mitos menakutkan. Politik kadang dirindukan terkadang malahan dicaci maki. Mengembalikan makna politik pada teks, inilah yang sulit dilakukan. Sebabnya, pada konteks inilah politik dipraktikkan dengan cara yang salah (Mubarok & Rahman, 2021).

Isu identitas agama (ketakwaan) justru semakin riuh diperdebatkan. Pada akhirnya, agama, hari-hari nampak sekali disalahkan. Sebenarnya, bukan agama yang salah, tetapi perilaku orang yang salah. Pada konteks itulah yang salah. Ahmad Syafii Ma'arif (Ma'arif, 2012) menuliskan, secara teori, semua agama pasti bertujuan baik dan mulia bagi kepentingan manusia di muka bumi. Lain teori, lain pula yang ditemui dalam praktik yang dilakukan oleh sebagian penganutnya sepanjang abad.

Jika itu mengacu pada Islam, toh selama ini di Indonesia baik-baik saja. Umat Islam dan seluruh penganut agama lain, bisa berdampingan dengan baik. Jika ada konflik, itupun pada skala yang sangat kecil. Kita melihat bangsa Indonesia baik-baik saja. Agama dalam hal ini memang menjadi dikotomis, selalu saja disalahkan. Padahal, letak permasalahannya hanyalah pada masalah politik. Kesalahan mengatur kekuasaan, itulah akar penyebab paling mendasar. Negara dengan pemerintahannya belum mampu memberikan keadilan pada rakyatnya.

Dalam Islam dikenal dengan konsep ulama dan *umara* (pemimpin). Jika menggunakan dua konsep ini, agama (Islam) harus hidup berdampingan dengan pemimpin. Ulama merupakan oposisi yang selalu memberikan nasihat pada penguasa. Jika penguasa salah menjalankan seni politiknya, maka ulama harus menegur (Wildan et al., 2015). Pada tingkat yang paling krusial, jika pemerintahan gagal mewujudkan keadilan, ulama boleh menggantinya. Tentu mengganti pemimpin negara adalah dengan cara yang konstitusional. Mengganti pemimpin negara dengan cara-cara yang memang telah tercantum dalam undang-undang.

Pada akhirnya, biarlah agama masuk dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara (Asad, 1999). Tidak boleh lagi ada phobia dalam beragama. Agama itu universal, masuk dalam ruang kehidupan seluruh masyarakat. Agama hadir untuk menjaga, baik di ruang privat maupun ruang publik. Dasar pokoknya, negara juga tidak dapat dilepaskan dari unsur agama.

KESIMPULAN

Artikel jurnal di atas membahas bagaimana persinggungan antara agama dan politik. Pada realitasnya, agama telah dijadikan alat dan dipolitisasi dan masuk ke ranah negara. Ini, misalnya, terjadi di Irak, Mesir, Turki, Pakistan, Tunisia, dan lain-lain. Di negara-negara tersebut merupakan sebuah contoh bagaimana agama dijadikan alat untuk melegitimasi kekuasaan negara sehingga menimbulkan sebuah kesan bahwa Islam merupakan sebuah agama hegemonik. Padahal, Islam dapat pula berdampingan dengan agama lain, seperti di Indonesia. Dengan demikian, apa yang penting dalam kehidupan bernegara adalah apakah pemerintahannya itu mampu memberikan pada rakyatnya atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Asad, T. (1993). *Genealogies of religion: Discipline and reasons of power in Christianity and Islam*. JHU Press.
- Asad, T. (1999). Religion, nation-state, secularism. *Nation and Religion: Perspectives on Europe and Asia*, 178–196.
- Connolly, W. E. (1999). *Why I am not a secularist*. U of Minnesota Press.

- Davie, G. (1996). *Religion in Britain since 1945: Believing without belonging*. Blackwell Publ.
- Grim, B. J., & Finke, R. (2010). *The price of freedom denied: Religious persecution and conflict in the twenty-first century*. Cambridge University Press.
- Hervieu-Léger, D. (2003). Religion und sozialer Zusammenhalt in Europa. *Transit*, 26, 101–119.
- Lapidus, I. M. (1975). The separation of state and religion in the development of early Islamic society. *International Journal of Middle East Studies*, 6(4), 363–385.
- Ma'arif, A. S. (2012). Politics of Identity and the Future of Our Pluralism. *Jakarta: Democracy Project*.
- Mubarok, M. F. Z., & Rahman, M. T. (2021). Membandingkan Konsep Islam Keindonesiaan dengan Islam Nusantara dalam Kerangka Pluralisme. *Hindu*, 1, 0–4.
- Wildan, D., Khaeruman, B., Rahman, M. T., & Awaludin, L. (2015). *Anatomi Gerakan Dakwah Persatuan Islam*. Amana Publishing.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).